

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi negara sedang berkembang awalnya lebih diidentikkan dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Konsep tersebut kemudian dikoreksi oleh Michael Todaro dalam bukunya yang berjudul *Development in Third World*. Pembangunan tidak hanya membahas mengenai indikator kuantitatif yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi makro melainkan juga berkaitan dengan indikator kualitatif yang membahas tentang tingginya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang secara terus menerus dan berkesinambungan dilakukan untuk meningkatkan GNP per kapita atau pendapatan masyarakat. GNP adalah jumlah barang dan jasa yang mampu diproduksi oleh warga negara suatu negara baik di dalam negara tersebut ataupun di luar negeri (Arsyad, 1999) (Damanhuri, 2014) , (Prayitno & Santosa, 1987).

Menurut Todaro, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila memenuhi tiga nilai pokok yaitu , (1) kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya semakin berkembang (*basic needs*), (2) masyarakat semakin memiliki rasa harga diri (*self-esteem*) yang meningkat, (3) hak asasi manusia untuk memilih (*freedom from servitude*) dalam masyarakat semakin meningkat. Dengan indikator

tersebut maka dapat disadari bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya mengenai peningkatan GNP tiap tahunnya. Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan suatu proses yang secara berkelanjutan mengakibatkan kenaikan pendapatan riil masyarakat dan perbaikan sistem kelembagaan dalam segala bidang (Arsyad, 1999).

“Menurut Lewis, pembangunan ekonomi berarti peningkatan dalam output per kapita. Sedangkan menurut Michael Todaro, pembangunan ekonomi adalah suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan besar dalam struktur sosial, sikap orang, lembaga-lembaga nasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan berkurangnya ketimpangan. Kindleberger memiliki perbedaan dalam definisi pembangunan ekonomi, yaitu peningkatan dalam output barang dan jasa dalam perekonomian (Damanhuri, 2014). “

2. Teori Pembangunan

Teori-teori dasar pertumbuhan dan pembangunan yang telah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok (Arsyad, 1999) :

2.1. Mazhab Historis

Mazhab historis melihat proses pembangunan lebih pada aspek empiris (historis), atau lebih melihat dari aspek sejarahnya (Arsyad, 1999).

2.1.1. Friedrich List

List merupakan salah satu penganut dari paham *Laissez faire*. Perkembangan ekonomi dapat terjadi apabila masyarakat memiliki kebebasan dalam organisasi politik fase perkembangan kebebasan manusia adalah primitif, beternak, pertanian, industri pengolahan (*manufacturing*), dan yang terakhir adalah pertanian, industri pengolahan (*manufacturing*), perdagangan (Arsyad, 1999).

2.1.2 Karl Bucher

Menurut Bucher, tahapan ekonomi adalah (Arsyad, 1999) :

- Produksi untuk kebutuhan sendiri
- Perekonomian kota dimana petukaran sudah meluas
- Perekonomian nasional dimana peran pedagang menjadi semakin penting.

2.1.3. Walt Whitman Rostow

Proses pembangunan menurut Rostow adalah :

- a) Masyarakat tradisional (*the traditional society*)
- b) Tahap Prasyarat Tinggal Landas
- c) Tahap Tinggal Landas (*Take-off*)

d) Tahap menuju kedewasaan (*drive to maturity*)

e) Tahap konsumsi tinggi (*the age of high mass-consumption*)

2.2. Teori Klasik

Menurut kaum klasik mekanisme pasar akan secara otomatis menjadikan perekonomian berjalan secara efisien. Teori kaum klasik muncul pada saat yang sama ketika Revolusi Industri muncul dan sistem ekonomi liberal berlaku. Ekonomi liberal menurut kaum klasik terjadi akibat adanya peningkatan jumlah penduduk dan kemajuan teknologi yang bersamaan. Pada awalnya kemajuan teknologi terjadi lebih dahulu dan pada akhirnya terjadi sebaliknya yaitu peningkatan jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan teknologi. (Prayitno & Santosa, 1987).

2.2.1. Adam Smith (1723-1790)

Menurut Adam Smith spesialisasi atau pembagian kerja diperlukan untuk mendukung perkembangan ekonomi agar produktivitas tenaga kerja dapat bertambah. Akan tetapi akumulasi modal harus ada terlebih dahulu sebelum pembagian kerja. Akumulasi modal diperoleh dari tabungan dan investasi, selain itu pasar harus seluas mungkin untuk menampung hasil produksi. Pasar terdiri dari pasar dalam negeri dan luar negeri. Apabila ada pasar yang cukup serta akumulasi modal yang dibutuhkan terpenuhi maka akan menghasilkan pembagian kerja dan produktivitas kerja yang meningkat. Kenaikan tersebut mengakibatkan penghasilan nasional naik sehingga bertambahnya jumlah penduduk dan akan memperluas pasar.

Keterbatasan sumber daya alam dan *hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang* akan menyebabkan perkembangan tersebut berhenti (Prayitno & Santosa, 1987).

2.2.2. David Ricardo (1772-1823)

Ciri-ciri pertumbuhan menurut David Ricardo dimulai dengan adanya keterbatasan tanah. Bertambah atau berkurangnya jumlah Tenaga kerja (penduduk) tergantung pada tingkat upah yang ditetapkan. Apabila tingkat upah di atas tingkat upah alamiah maka tenaga kerja (penduduk) akan terus bertambah. Pertambahan tenaga kerja (penduduk) menyebabkan berlakunya hukum *diminishing return* yang akan berakibat pada penurunan upah tenaga kerja (penduduk) (Prayitno & Santosa, 1987).

Proses tersebut akan berhenti ketika tingkat upah telah turun dibawa tingkat upah alamiah yang akan menyebabkan penurunan jumlah tenaga kerja (penduduk). Dan tingkat upah akan kembali naik sampai pada tingkat upah alamiah, pada tahap ini jumlah tenaga kerja (penduduk) akan konstan. Menurut David Ricardo adanya akumulasi modal dan perkembangan teknologi cenderung meningkatkan produktivitas dan dapat memperlambat bekerjanya *the law diminishing returns* yang akan menurunkan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal. *The law diminishing returns* merupakan suatu kekuatan dinamis yang selalu menarik perekonomian menuju tingkat upah minimum (Prayitno & Santosa, 1987).

2.3. Neo Klasik (Slow-Swan)

Tokoh yang terkenal dari mazhab Neo Klasik adalah Robert M. Solow dan Trevor W. Swan, sehingga nama dari teori mereka adalah Teori Solow-Swan. Teori ini berasumsi bahwa teknologi tetap, tidak ada perdagangan luar negeri serta arus modal masuk atau keluar negara, tingkat penduduk atau tenaga kerja dianggap konstan serta tercapainya prinsip *full employment*, dimana seluruh penduduk bekerja dan faktor produksi lainnya dipergunakan secara penuh. Dalam teori ini campur tangan pemerintah tidak diperlukan karena mekanisme pasar mampu menciptakan keseimbangannya sendiri (Arifin & W, 2007).

2.4. Teori Keynesian

Teori ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes, Keynes mengungkapkan bahwa untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi maka diperlukan campur tangan pemerintah untuk menyelesaikannya variabel yang ditambahkan dalam teori ini adalah pengeluaran pemerintah. Menurut Keynes pasar tidak mampu menyelesaikan masalahnya sehingga diharapkan dengan adanya variabel pengeluaran pemerintah mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pasar (Rahman, 2016).

2.5. Teori Harrod –Domar

Teori Harrod-Domar dikemukakan oleh Sir Roy F. Harrod dan Evsey Domar. Teori ini merupakan teori yang dikembangkan dari teori Keynesian. Dalam teori ini yang penting dalam pertumbuhan

pembentukan modal adalah hal yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal dapat diperoleh dari tabungan dan investasi. Secara matematis dapat ditulis dengan

$$g = s/v$$

Notasi g merupakan pertumbuhan ekonomi, s marginal *propensity to save*, v rasio antara modal dengan output (*capital output ratio*). Pertumbuhan dalam kapasitas output akan sesuai dengan pertumbuhan permintaannya apabila $g = s/v$. Apabila pertumbuhan tidak sesuai dengan jalurnya maka akan menyebabkan ketidakstabilan perekonomian. Keseimbangan tidak dengan sendirinya menyesuaikan dengan keadaan ini, sehingga membutuhkan campur tangan pemerintah yang diharapkan mampu mencapai keseimbangan antara pertumbuhan permintaan dengan perekonomian (Frisdiantara & Mukhlis, 2016).

Asumsi teori Harrod Domar adalah (1) perekonomian mengalami keadaan *full employment* (semua warga negara memiliki pekerjaan) serta barang modal yang diproduksi masyarakat digunakan secara penuh, (2) perekonomian terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, (3) besarnya tabungan proporsional dengan pendapatan nasional yang berarti bahwa tabungan dimulai dari titik nol, (3) terdapat hubungan langsung antara banyaknya stok kapital (K) dengan GNP (Y), ini berarti bahwa semakin banyak bagian dari GNP yang ditabung atau diinvestasikan maka pertumbuhan GNP akan menjadi lebih besar (Prayitno & Santosa, 1987).

2.6. Teori Schumpeter

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh adanya proses inovasi (penemuan baru dalam bidang teknologi produksi) yang dilakukan oleh para pengusaha. Tanpa adanya inovasi maka pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi. Proses ini terdiri dari tiga tahap yaitu (Prayitno & Santosa, 1987) :

- Teknologi baru diperkenalkan
- Inovasi menimbulkan keuntungan yang lebih
- Proses imitasi inovasi, yaitu penemuan baru tersebut akan ditiru oleh pengusaha lain, sehingga seluruh pengusaha akan dapat meningkatkan hasil produksi baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.

2.7. Teori Kuznets

Dalam teori Kuznets pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang akan mampu memenuhi kebutuhan benda-benda ekonomi kepada rakyat apabila terdapat kemajuan dalam bidang teknologi, kelembagaan serta penyesuaian ideologi. Untuk mencapai kematangan ekonomi maka dibutuhkan adanya peningkatan output secara terus menerus, diciptakannya pra kondisi yakni adanya kemajuan teknologi yang disertai dengan perubahan perilaku, persepsi sosial, serta adanya penyesuaian ideologi (Prayitno & Santosa, 1987).

Teori ini kemudian dijabarkan oleh Chenerry dan Syrquin (1975) mengenai perubahan yang berlaku dalam proses

pembangunan sebuah negara adalah perubahan struktur ekonomi yakni (1) perubahan proses alokasi sumber daya (*resources*) yang meliputi struktur permintaan domestik (pengeluaran masyarakat atas produksi dalam negeri), struktur produksi dan struktur perdagangan. (2) akumulasi modal yakni pembentukan modal atau investasi, serta pengumpulan pendapatan pemerintah, dan pengadaan kegiatan pendidikan untuk masyarakat. (3) perubahan dalam proses demografis yang meliputi perubahan alokasi tenaga kerja dalam berbagai sektor urbanisasi, tingkat kelahiran dan kematian, serta distribusi pendapatan (Prayitno & Santosa, 1987).

2.8. Teori Dependensia

Asumsi dasar teori ini adalah membagi negara di dunia menjadi negara maju dan negara sedang berkembang (NSB). Andre Gunder Frank mengelompokkan negara maju ke dalam negara-negara metropolis maju (*developed metropolitan countries*) dan NSB dikelompokkan ke dalam negara satelit yang terbelakang (*satellite underdeveloped countries*). Salah satu ekonom penganut dependensia membagi perekonomian menjadi negara maju di pusat (*core/ central*) dan kelompok negara miskin (*periphery*) (Kuncoro, 2010).

Interaksi negara maju dengan negara miskin lebih bersifat eksploitasi negara maju terhadap negara miskin. Dominasi perekonomian negara maju menyebabkan ketergantungan negara periferi terhadap negara maju tersebut. Menurut Paul Baran,

investasi perusahaan multinasional dari negara maju akan mampu meningkatkan pendapatan nasional negara miskin. Namun peningkatan tersebut tidak mampu dirasakan oleh semua lapisan masyarakat karena kepincangan dalam distribusi pendapatan. Keuntungan tersebut hanya mampu dinikmati oleh sebagian anggota masyarakat tertentu karena eksploitasi sumber daya yang ada (Kuncoro, 2010).

Ekonom penganut Dependensia menuduh bahwa ketergantungan yang terjadi di NSB juga disebabkan oleh badan-badan dunia internasional, seperti Bank Indonesia dan IMF. Bantuan yang diberikan tidak bisa terlepas dari *vested of interest* dari negara donor yang mendukung dana lembaga tersebut. Pemberian bantuan dalam bentuk barang, yang biasanya berteknologi tinggi tidak sesuai dengan kondisi negara yang menerima bantuan, sehingga yang terjadi ketergantungan terhadap teknologi semakin meningkat, dan nilai bantuan yang kemudian sulit dikuantifikasi. Pengiriman bantuan tenaga ahli oleh negara pendonor, merupakan salah satu cara untuk membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga mereka. Dan yang lebih parah tenaga ahli tersebut, memiliki keahlian yang pas-pasan, dan digaji dengan gaji yang tinggi (Kuncoro, 2010).

2.9. Teori Neo-Klasik

Teori ini mengungkapkan bahwa keterbelakangan yang terjadi di NSB disebabkan oleh faktor internal negara tersebut. Misalnya besarnya derajat campur tangan pemerintah dalam aktivitas ekonomi,

meluasnya korupsi, dan kurangnya intensif ekonomi, pengalokasian sumber daya yang tidak sesuai. Ketidakefisienan “mesin” perekonomian NSB disebabkan oleh alokasi sumberdaya yang salah menyebabkan ketidakefektifan penetapan harga yang menyebabkan pembagian “kue pembangunan” tidak merata (Kuncoro, 2010).

Semakin besar campur tangan pemerintah dalam perekonomian, semakin lambat laju pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh suatu negara. Dalam teori ini, pasar bebas perekonomian *laissez faire* menjadi kata kunci keberhasilan dalam pembangunan menurut teori neoklasik. Namun, teori ini tepat diterapkan di negara maju dibandingkn negara NSB (Kuncoro, 2010).

3. Kemiskinan

3.1. Pengertian Kemiskinan

Menurut Bank Dunia kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk dapat memperoleh standar hidup yang layak. Akibat dari ketidak mampuan tersebut, maka seseorang harus mengakui keunggulan orang atau kelompok lain dalam persaingan untuk memperoleh pendapatan dan memiliki aset produktif, hal ini pada akhirnya akan menyebabkan ketertinggalan (Mikkelsen, 2003) (Prayitno & Santosa, 1987).

Menurut Bank Dunia dimensi kemiskinan meliputi :*Pertama*, kemiskinan bersifat multidimensional, kebutuhan manusia terkait dengan berbagai macam aspek, oleh karena itu kemiskinan berkaitan dengan banyak aspek. Apabila ditinjau dari kebijakan umum

kemiskinan terdiri dari aspek primer dan sekunder. Aspek primer meliputi miskin terhadap aset-aset, organisasi politik, pengetahuan serta ketrampilan. Aspek sekunder terdiri dari miskin jaringan sosial sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi tersebut memanifestasikan dirinya ke dalam bentuk kekurangan gizi, air, rumah tidak sehat, akses kesehatan dan pendidikan yang kurang (Prayitno & Santosa, 1987).

Kedua, Dimensi kemiskinan memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung. Ini berarti apabila terjadi perubahan dalam satu aspek baik itu kemajuan atau pun kemunduran maka dapat mempengaruhi aspek lainnya. *Ketiga*, hakekat yang miskin sebenarnya adalah manusia, baik secara individu maupun kelompok. Kemiskinan muncul akibat adanya masalah yang berkaitan dengan pemilikan faktor produksi, produktivitas, dan tingkat perkembangan masyarakat, kebijakan pembangunan nasional (Arsyad, 1999) (Prayitno & Santosa, 1987).

3.2. Ukuran Kemiskinan

3.2.1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan dapat diketahui dari dihitung dengan satuan angka ataupun per kepala. Penghitungan ini menghitung orang yang memiliki penghasilan dibawah garis kemiskinan absolut. Kesulitan dalam mengukur kemiskinan absolut disebabkan karena kebutuhan dasar minimum seseorang dipengaruhi oleh adat kebiasaan, iklim, kemajuan teknologi, dan faktot ekonomi lainnya. Menurut ILO

(*International Labor Organization*) kebutuhan dasar tidak hanya kebutuhan orang ataupun keluarga akan tetapi termasuk dengan kebutuhan lingkungan fisik (Arsyad, 1999) .

“Kebutuhan dasar meliputi 2 unsur : pertama, kebutuhan yang meliputi tuntutan minimal tertentu dari suatu keluarga sebagai konsumsi pribadi seperti makan makanan yang cukup, tempat tinggal, pakaian, juga peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang dilaksanakan. Kedua kebutuhan meliputi pelayanan sosial yang diberikan oleh dan untuk masyarakat seperti meminum air minum yang bersih, pendidikan dan kultural.”

3.2.2. Kemiskinan Relatif

Dalam menentukan kemiskinan dengan ukuran kemiskinan relatif, tidak hanya melihat aspek terpenuhinya kebutuhan dasar. Tidak setiap orang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya tidak dikategorikan miskin, hal ini terjadi karena kebutuhan dasar yang telah dicapai lebih rendah dibandingkan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut maka kemiskinan relatif dapat mengalami perubahan sesuai dengan tingkat hidup masyarakat yang berubah. Kincaid (1975) melihat kemiskinan dari aspek ketimpangan sosial. Menurutnya kemiskinan dan ketimpangan akan berhubungan positif. Artinya bahwa semakin besar ketimpangan yang ada antara masyarakat golongan atas dengan masyarakat golongan bawah dalam suatu masyarakat maka, semakin besar pula jumlah penduduk suatu negara yang dikatakan miskin (Arsyad, 1999).

3.3. Penyebab Kemiskinan

Menurut Imam Nurhidayat dan Anis Nurnasening dalam Kamaluddin (1993), berpendapat bahwa faktor penyebab kemiskinan antara lain adalah etos kerja yang rendah, sehingga tidak mendukung peningkatan produktivitas, produksi yang berakibat pada penghasilan seseorang yang tidak mengalami peningkatan (Kasim, 2006) .

Menurut Hadiwigeno dan Pakphan (1993) penyebab kemiskinan bisa dilihat dari sudut keluarga, penduduk dan wilayah. Dari sudut keluarga, keluarga miskin memiliki ciri yang bisa dilihat dari pendapatan per kapita keluarga, status gizi, dan umur harapan hidup. Ciri-ciri tersebut sebagai akibat dari tingkat pendidikan, ketrampilan, jumlah anggota keluarga, nilai atau sikap, pekerjaan utama, modal kerja dan tingkat penggunaan input. Penyebab dari sudut wilayah adalah kondisi alam, sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, lembaga keuangan, jalan , dan sebagainya (Kasim, 2006).

Dari pendapat tersebut penyebab dari kemiskinan sangat bermacam-macam. Wilayah yang berbeda antar daerah menyebabkan setiap penanganan kemiskinan di satu daerah dengan daerah lain harus disesuaikan dengan faktor penyebab yang ada serta tidak bisa disamakan antar daerah. Karakteristik penanggulangan kemiskinan juga tidak bisa hanya dengan waktu yang singkat. Selain itu, diperlukannya integrasi antar sektor mengingat penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi saja akan tetapi faktor-faktor lain juga saling berpengaruh.

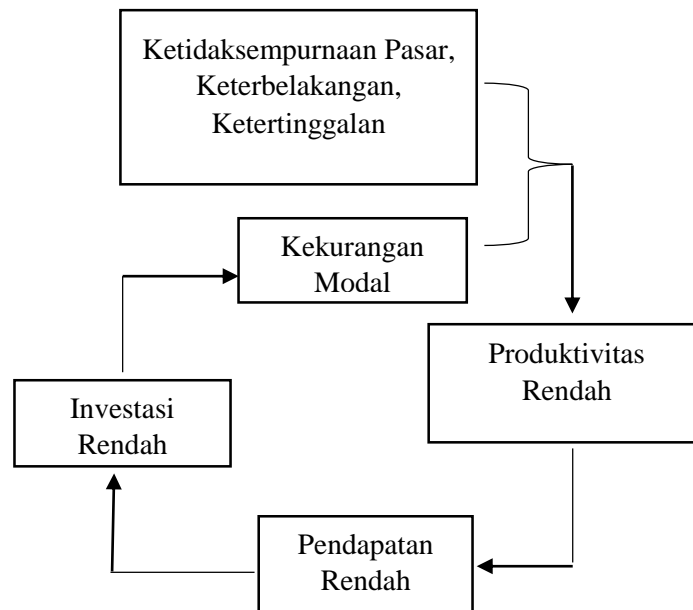
3.4. Indikator Kemiskinan

Menurut BPS, kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar baik pangan maupun non pangan. Dalam menghitung angka kemiskinan BPS menggunakan tingkat konsumsi kebutuhan dasar (*basic needs*). Artinya kemiskinan bisa diartikan sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhn dasar. Indikator yang digunakan BPS adalah *Head Count Indec* (HDI), yaitu jumlah persentase penduduk miskin yag berada di bawah garis kemiskinan (Khomsan, et al., 2015).

Garis kemiskinan didapatkan dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum baik pangan maupun non pangan. Besarnya kebutuhan pangan yang telah ditetapkan adalah sebesar 2.100 kkal/kapita/hari. Sedangkan kebutuhan non pangan yang harus dipenuhi adalah kesehatan, pendidikan, transportasi, perumahan, bahan bakar, sandang (Khomsan, et al., 2015).

Dalam menghitung jumlah penduduk miskin, selain menggunakan analisis tentang penduduk miskin, BPS juga menggunakan karakteristik rumah tangga miskin. Karakteristik tersebut adalah kepala rumah tangga berstatus janda, pendidikan kepala rumah tangga rendah atau buta huruf, perbedaan geografis antar kota dan desa, lapangan usaha dan status pekerjaan, penguasaan luas lantai per kapita, akses terhadap air bersih, fasilitas bung air besar, pemanfaatn listrik dan sebagainya (Khomsan, et al., 2015)

3.5. Efek Lingkaran Kemiskinan Terhadap Pembangunan Ekonomi



Gambar 2. 1.

Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse

Sumber : Kuncoro, 2010

Lingkaran setan kemiskinan ini disebabkan oleh adanya hambatan pada tingkat pembentukan modal. Pembentukan modal diperoleh dari tingkat tabungan. Lingkaran kemiskinan bisa terjadi dari sisi penawaran ataupun sisi permintaan modal. *Pertama*, penawaran modal Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan tingkat produktivitas mereka rendah. Hal ini membuat kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Karena pembentukan moda diperoleh dari tingkat tabungan, akibat dari kemampuan menabung masyarakat yang rendah mengakibatkan pembetulan modal juga rendah. Efek pembentukan modal yang rendah menyebabkan negara menghadapi kekurangan

modal yang juga berimplikasi pada tingkat produktivitas yang rendah (Suman dalam (Apriyanti, 2011), (Kuncoro, 2010).

Kedua, adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya (Agus Suman, 2006 (Apriyanti, 2011), (Kuncoro, 2010).

4. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan menjadi konsep atas pembentukan *Sustainable Development Goals* (SDG'S) . Konsep pembangunan berkelanjutan akan memberikan wacana baru pentingnya menjaga lingkungan untuk generasi yang akan datang. Menurut Brundtland Report dari PBB 1987, pembangunan yang berkelanjutan adalah mengenai bagaimana kita memperbaiki lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan dan melupakan keadilan sosial. Menurut Emil Salim (dalam Askar Jaya, 2004) pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memenuhi aspirasi dan kebutuhan manusia (Dewi, 2011), (Jaya, 2004) .

Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki 3 konsep yakni, (1) keberlanjutan ekonomi berarti pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara terus menerus, namun tidak menimbulkan ketidakseimbangan pertanian dan industri. (2) keberlanjutan lingkungan diartikan sebagai memelihara sumber daya

agar tetap stabil, tanpa melakukan eksploitasi alam dan penyerapan lingkungan. (3) keberlanjutan sosial adalah sistem yang mampu mencapai kesetaraan layanan sosial, baik kesehatan, pendidikan, gender dan akuntabilitas politik ((menurut Prof. Dr. Emil Salim, 2010)(dalam (Dewi, 2011), (Haris, 2000)(dalam (Jaya, 2004).

Agar pembangunan berkelanjutan dapat dicapai, penting untuk menyelaraskan tiga elemen inti: pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial dan perlindungan lingkungan hidup. Elemen-elemen ini saling terkait dan semuanya amat penting untuk kesejahteraan diri individu dan masyarakat. Pengentasan kemiskinan dalam semua bentuk dan dimensinya adalah sebuah persyaratan yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, haruslah dilakukan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan adil yang menciptakan peluang yang lebih besar untuk semua, mengurangi ketidaksetaraan, meningkatkan standar kehidupan dasar, mendorong pembangunan dan inklusi sosial yang adil, serta mendorong pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem yang berkelanjutan dan terpadu ((ILO), 2016).

4.1. Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Dalam pembangunan berkelanjutan, terdapat 4 komponen yang harus diperhatikan, yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan prespektif jangka panjang (Jaya, 2004).

- **Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial**

Hal ini harus dilandasi meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya kesempatan dan peran perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh, kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan dibanyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang yang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Ini berarti pembangunan generasi masa kini perlu mempertimbangkan generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhannya (Jaya, 2004).

- **Pembangunan yang Menghargai Keanekaragaman**

Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa mendatang. Pemeliharaan keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih mengerti (Jaya, 2004).

- **Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif**

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antar sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini maka pelaksanaan pembangunan yang lebih *integratif* merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini tantangan utama dalam kelembagaan (Jaya, 2004).

- Pembangunan yang Meminta Prespektif Jangka Panjang

Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan, implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakannya penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dan *prosedur discounting*. Persepsi jangka panjang adalah mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi, oleh karena itu perlu dipertimbangkan (Jaya, 2004).

5. SDGS (*Sustainable Development Goals*)

5.1. Konsep SDGs

SDG`s merupakan lanjutan dari MDG`s (*Millenium Development Goals*) yang berakhir tahun 2015. SDG`S didiskusikan untuk pertama kali pada *United Nations Conference on Sustainable Development* yang diadakan di Rio de Janeiro tahun 2012. Kemudian disahkan pada KTT Pembangunan Berkelanjutan PBB di Newyork tanggal 25-27 Septeber 2015. KTT tersebut menetapkan bahwa pelaksanaan SDG`s

akan dimulai setelah tahun 2015 hingga tahun 2030 dan akan berlaku untuk semua negara baik negara berkembang ataupun negara maju. Sehingga dapat diartikan bahwa SDG`s adalah sebuah dokumen yang akan dijadikan panduan atau acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Kerangka kerja ini berlaku selama 15 tahun hingga tahun 2030. SDGs diharapkan untuk dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan dicapai pada tanggal 31 Desember 2030 (Risanda, 2015), ((ILO), 2016).

5.2. Konsep SDG`s

Terdapat 3 pilar dalam konsep pengembangan SDG`s yang merupakan lanjutan dari MDG`s adalah indikator pertama pembangunan manusia (*Human Development*), diantaranya adalah pendidikan dan kesehatan. Indikator kedua adalah lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan. Indikator ketiga lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*) yaitu ketersediaan sumberdaya dan kualitas lingkungan yang baik (Risanda, 2015).

5.3. Tujuan SDG`s

SDG`s terdiri dalam 17 tujuan untuk tahun 2016-2030 yaitu (Madolan, 2016) :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.

3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

B. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
----	------------------	------------------	-----------

1	Dyah Ayu Setyaningrum (2011) "Pengaruh Implementasi Corporate Responsibility Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat (Studi Kasus pada PT. APAC INTI CORPORA, Bawen).	Yang menjadi variabel independen adalah variabel CSR yang meliputi <i>Corporate Social Responsibility Goal, Corporate Social Issue, dan Corporate Relation Program</i> . Serta variabel dependennya adalah Kesejahteraan hidup masyarakat. Hasil penelitian adalah semua variabel yang digunakan berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Selain itu program apabila dalam penelitian (Dyah, 2011), menggunakan perusahaan swasta. Program CSR dalam penelitian ini merupakan program pemerintah dan tidak hanya dilaksanakan oleh satu perasaan, namun beberapa beberapa perusahaan yang menjadi anggota Forum Pelaksana TSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan).
2	(Liyana Apriyanti, Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang, 2011)	Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif yaitu uji pangkat tanda Wilcoxon. Berdasarkan hasil analisis deskriptif tentang persepsi anggota KSM terhadap pinjaman bergulir menunjukkan bahwa Adanya peningkatan ini menunjukkan bahwa apabila program pinjaman bergulir dilaksanakan secara baik akan dapat memutus lingkaran setan kemiskinan.	Analisis ini menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif menggunakan metode coding dan naalissi kuantitatif menggunakan regresi berganda.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
----	------------------	------------------	-----------

3	Pramono Hariadi (2010) "Dampak Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Propinsi Jawa Tengah)"	Hasil dari penelitian ini adalah adanya pelaksanaan otonomi daerah telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SDG`s di Kabupaten Kulon Progo.
4	(Sutikno, Soedjono, Rumiati, & Trisunarno, 2010) Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Model Pendekatan Sistem	Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT dan scoring. Hasil penelitiannya adalah program terpilih di antaranya pelatihan dan pendampingan wirausaha, pendirian koperasi simpan pinjam, pengadaan air bersih untuk RTM, pengembangan desa dengan pendayagunaan air bersih, penanganan sampah rumahtangga, dan program pendidikan paket A, B, dan C.	Penelitian ini, meneliti penerapan program meneliti penerapan program pengentasan kemiskinan, yang merupakan penerapan dari tujuan SDG`S (1) pengentasan kemiskinan, (3) kesehatan untuk semua, (10) mengurangi kesenjangan. Program-program tersebut adalah OVOC (<i>One Village One Sister Company</i>), Bela dan Beli Kulon Progom, KAKB (Keluarga Asuh Keluarga Binangun), UC (<i>Universal Coverage</i>).

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
5	(Haji Ari Darisman, 2015) "Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar Kulon Progo Melalui Program <i>One Village One Sister Company</i> (OVOC) Di Desa Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta	Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Dampak dari adanya program OVOC dapat dilihat dari beberapa bidang yaitu: Dampak ekonomi, adanya bantuan alat industri bisa meningkatkan produksi yang lebih berkualitas, dengan anakan kambing masyarakat memiliki tabungan untuk masa depan, pasar murah bisa memberikan pelayanan yang terjangkau oleh keadaan ekonomi masyarakat Sidoharjo. Dampak sosial, perusahaan ikut turut serta memajukan kegiatan penduduk yaitu membantu untuk melengkapi peralatan ibadah, membantu memudahkan akses jalan untuk masyarakat dengan program pengerasan jalan.	Program OVOC yang di teliti tidak hanya tertuju pada satu perusahaan saja, melainkan lebih secara umum

C. Hipotesis

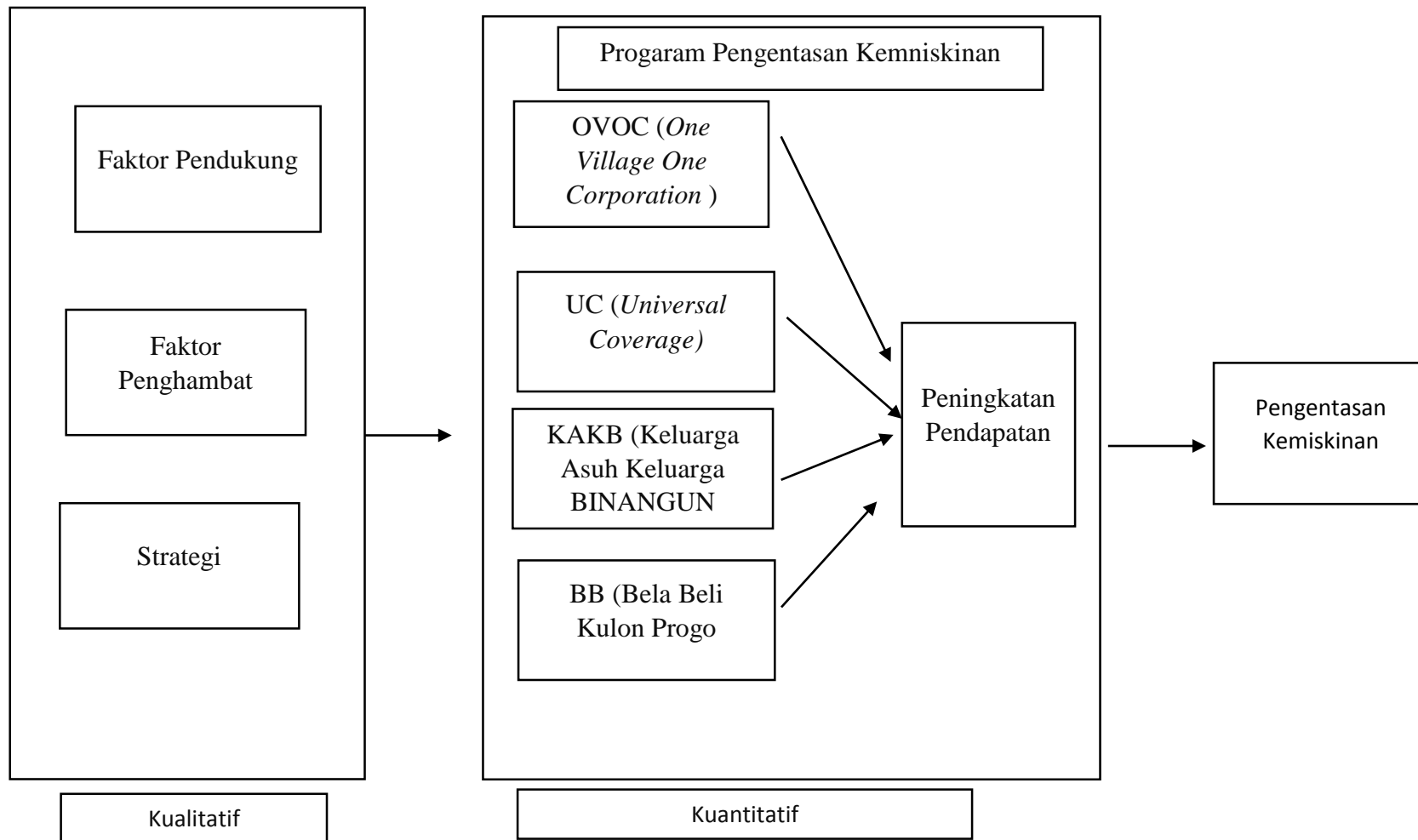
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang dibahas, yang kebenarannya masih harus diuji. Hipotesis merupakan rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teoritis yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan. Dengan mendasarkan pada identifikasi masalah serta kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 = Input berpengaruh positif terhadap hasil program pengentasan kemiskinan.

H2 = Implementasi berpengaruh positif terhadap hasil program pengentasan kemiskinan.

D. Kerangka Berpikir

Pelaksanaan SDG`s diharapkan mampu menjadi panduan pemerintah baik nasional maupun daerah. Dalam penelitian ini peneliti menjadikan keangka berpikir sebagai acuan dalam meneliti pelaksanaan SDG`s oleh pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan di daerah Kulon Progo.



Sumber : (Firdausi , 2010) modifikasi

Gambar 2.2.
Kerangka Berpikir